



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III DPR RI
RAPAT KERJA DENGAN WAKIL JAKSA AGUNG RI
DAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Wakil Jaksa Agung RI dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 31 Agustus 2023
Pukul	:	14.09 s.d. 16.19 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara II DPR RI Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A./Ketua Komisi III/F-PDIP
Acara	:	1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2022; 2. Hapsem BPK Tahun Anggaran 2022; dan 3. Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2024 beserta usulan program.
Sekretaris Rapat	:	Novianti, S.E. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI)
Hadir	:	A. Anggota: 33 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

Pimpinan:

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (Ketua/F-PIDP);
2. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (Wakil Ketua/F-P. Gerindra);
3. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom (Wakil Ketua/F-P. NASDEM)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

9 dari 11 orang anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
3. Drs. M. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhiela Fararez, S.H., L.L.M.
5. Dede Idra Permana, S.H.
6. Johan Budi Sapto Pribowo
7. I Wayan Sudirta, S.H.
8. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
9. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin

Fraksi Partai Golongan Karya:

3 dari 7 orang Anggota:

1. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
2. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
3. Supriansa, S.H., M.H.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

4 dari 6 orang Anggota:

1. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
2. Hj. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
4. Bimantoro Wiyono, S.H.

Fraksi Partai Nasional Demokrat:

1 dari 4 orang Anggota:

Drs. Y. Jacky Uli, M.N.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

3 dari 5 orang Anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
3. H. Heru Widodo, S. Psi.

Fraksi Partai Demokrat:

4 dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,
ACCS.
2. H. Santoso, S.H., M.H.
3. H. Agung Budi Santoso, S.H., M.H.
4. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

4 dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.
2. H. M. Nasir Djamil, M.Si.
3. Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun
4. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah,

S.H., M.H. M.Si.

Fraksi Partai Amanat Nasional:

1 dari 3 orang Anggota:

Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

1 dari 1 orang Anggota:

Hj. Nurhayati

B. Undangan:

1. Dr. Sunatra (Wakil Jaksa Agung RI) beserta jajaran;
2. Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK) beserta jajaran.

Anggota Izin

: **Pimpinan**

- Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.H. (Wakil Ketua/F-PG)

F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
- H. Agustiar Sabran, S. Kom.

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.):

Pak Sarif, silakan.
Pak Jenderal, kiri oke?
Kanan siap, oke.

Ya, sudah waktunya. Kita mulai, Pak Waka, Pak Kepala.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera kepada kita semua,

Yang terhormat, Pimpinan, saya ditemani dengan senior, Pangeran dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Jaksa Agung, dalam hal ini diwakili Pak Wakil Jaksa Agung dan seluruh jajaran,
Begitu juga yang terhormat Saudara Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan seluruh jajaran,

Terima kasih kehadiran dan seluruh hadirin yang kami hormati,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan rapat kerja pada hari ini dan hari ini kita akan rapat dengan tiga agenda.

Agenda yang pertama itu adalah agenda laporan keuangan mitra, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan PPATK untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 dan juga diikuti dengan laporan hasil semester pada tahun yang bersangkutan, yaitu 2022. Kemudian, juga yang kedua itu adalah RKL, RKA, dan KL Tahun Anggaran 2024 beserta seluruh usulan programnya.

Jadi, rekan-rekan sekalian, laporan keuangan mitra ini di Tahun 2022 sudah selesai dan di paripurna kan seluruh fraksi setuju. Jadi, sebenarnya udah sah. Hanya saja, ada beberapa hal yang mesti ditindaklanjuti atas temuan BPK yang ada dalam Hapsem, laporan semester I dan II yang dilanjutkan, dan itu urusan langsung dengan BPK. Jadi, nanti temuan BPK ini kemudian ditindaklanjuti oleh mitra, dikordinasikan langsung kepada BPK.

Namun demikian, kawan-kawan juga boleh bertanya soal itu, tapi tidak merubah. Itu merupakan kebijakan BPK, langsung dengan mitra. Jadi, sebenarnya laporan yang pertama dan kedua, materi pertama dan kedua itu selesai. Yang belum selesai, Saudara-saudara sekalian, itu adalah Anggaran Tahun 2024. Anggaran tahun 2024 siklusnya sebagai berikut.

Jadi, dulu dari tripairtite, pemerintah, Menteri Keuangan, Bappenas, dan mitra, Kejaksaan atau PPATK membuat pagu indikatif dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu indikatif sudah kita rapatkan di sini, kemudian jawaban kawan-kawan meminta tambahan.

Atas dasar tambahan itu dikonsolidir, diharmonisasi di Banggar. Dalam hal ini di Banggar kemudian bicara dengan pemerintah, ada ngigak ini duitnya. Kemudian, masuk kepada Presiden, ke luar ke dalam nota keuangan. Dari nota keuangan ini mitra kita akhirnya disetujui, ada yang tidak ajuan anggarannya.

Namun demikian, masih ada lagi kesempatan untuk menambah anggaran, kalau mereka belum puas terhadap mitra yang kita punya. Komisi III punya 14 ini, masih belum puas *nih*, masih diberi peluang. Nanti peluang itu akan dirapatkan oleh Banggar lagi tanggal 12 sampai 14 September. Jadi, ini proses *lobbying* sebelum digetok APBN, selambat-lambatnya 30 Oktober, namun akan diselesaikan sebelum 1 Oktober, mau diselesaikan itu APBN-nya. RUU APBN akan kita selesaikan mengingat ke depannya kita sudah masuk dalam masa kampanye.

Jadi, kawan-kawan ini akan kampanye semua maka lebih... diselesaikan lebih cepat oleh DPR. Itu kira-kira (*suara tidak jelas 11:50*) Jadi, fokus rapat kita kali ini sesungguhnya lebih pada *laps* terakhir ini, *laps* terakhir anggaran, *laps* terakhir anggaran ini atas dasar finalisasi kemarin setelah nota keuangan. Apakah Kejaksaan Agung cukup puas, apakah PPATK cukup puas? Kalau belum puas, merasa anggarannya kurang, diajukan lagi.

Nah, itu baru nanti proses berikut adalah proses yang resmi melalui tusi Pimpinan DPR, eh, Pimpinan Komisi III ke Banggar. Yang tidak resmi, silahkan lobi-lobi.

Begitu, Pak Kajati, ya, eh, Bapak Kajati atau Pak, oh, Pak Waja *toh*.
Pak Waja atau Pak Kajati?
Oh, ada *tuh* Pak Waja yang biasanya lobby.

Begitu kira-kira, Saudara sekalian.

Rapat mau kita akhiri jam berapa? Jam empat ya. Maksimum jam empat. Tulis dulu.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Rapat juga kita nyatakan terbuka.

(RAPAT SETUJU)

Oke.

ini langsung saja, dari anggaran dalam catatan kami, Saudara sekalian, Saudara Wakil Jaksa Agung dan Saudara Kepala PPATK, berkaitan dengan anggaran 2024, usulan anggarannya dapat kami sampaikan bahwa:

Yang pertama, untuk Kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia dulu. Pagu indikatif pertama sepuluh triliun koma sekian, usulan tambahannya menjadi sebelas triliun, *eh*, usulan tambahannya sebelas triliun koma empat, 11,4 triliun. Pagu indikatif setelah usulan tambahan tahun 2024 sebesar 21,4 triliun, nota keuangan, yang kemarin nota keuangan jatuh di angka 17,4 triliun. Itu *lap* terakhir setelah nota keuangan.

PPATK, pagu indikatif pertama 242 koma sekian miliar, usulan tambahannya menjadi 84,3 miliar. Pagu indikatif setelah usulan ke luar adalah 326,7 miliar. Itu pagu indikatif usulannya sebesar itu. Hasil nota keuangan tahun 2024, *oh*, salah ini kitanya, jadi nanti diluruskan ya, PPATK.

Dari RKA Tahun 2024 ini Komisi III ingin mendengarkan penjelasan mitra, apakah ada usulan program tambahan sesuai dengan tahun 2024 ke depan melalui dana hibah dan lain-lain. Untuk itu, kami persilakan Saudara Wakil Jaksa Agung memberikan penjelasan, kemudian dilanjutkan kepada Saudara Kepala PPATK. Masing-masing diberikan waktu sementara itu 15 menit boleh nambah, begitu.

Pak Wakil Jaksa Agung, kami persilakan, fokus di anggaran.

Terima kasih.

WAKIL JAKSA AGUNG RI (DR. SUNARTA):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami sampaikan salam hormat dan permintaan maaf dari Bapak Jaksa Agung karena beliau ada kegiatan yang sudah terjadwal sehingga kami diperintahkan beserta para Jaksa Agung Muda untuk menghadiri acara ini, untuk selengkapnya kami sampaikan jawaban ini.

Pertama-tama yang paling utama tentu mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu wa ta'ala* karena atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dalam keadaan sehat walafiat.

Pada kesempatan ini kami hadir memenuhi undangan Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI untuk memberikan penjelasan terkait Laporan Keuangan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022, hasil pemeriksaan BPK Tahun 2022, dan pembahasan RKAKL Kejaksaan RI tahun 2024 beserta usulan program.

Bapak-Ibu Pimpinan serta Anggota Komisi III yang saya hormati,

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tahun 2022 telah berhasil mempertahankan opini dan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI sebanyak tujuh kali berturut-turut. Berkaitan dengan hal tersebut, kami segenap jajaran Kejaksaan Republik Indonesia terus berkomitmen untuk berusaha mempertahankan hasil opini predikat WTP tersebut sehingga Kejaksaan menjadi institusi yang akuntabel.

Selanjutnya, sebagaimana yang tercantum dalam undangan rapat dari Komisi III DPR RI, telah diagendakan untuk membahas laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun 2022, Hapsem BPK Tahun 2022, dan pembahasan RKAKL Tahun 2024 beserta usulan program. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memaparkan jawaban terhadap pokok pembahasan yang kami tuangkan dalam bentuk tulisan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Yang pertama, pembahasan tentang laporan keuangan Kejaksaan RI di Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan tahun 2000, Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan berbagai program dan belanja, dengan rincian realisasi penerapan anggaran dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBPN sebagai berikut.

Realisasi anggaran sebesar Rp10.798.163.737.172,00 atau secara prosentase sebesar 98,93% dari total pagu anggaran sebesar 10.919.809.511.000.

Kemudian, realisasi anggaran Kejaksaan per program periode tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Program Dukungan Manajemen sebesar Rp10.263.212.801.194,00 atau 11 sebesar 99,5% dari pagu anggaran, dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp534.950.935.978 atau sebesar 92,2%. Realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar 2 triliun 200 ulangi, Rp2.783.446.966.092,00 atau secara prosentase sebesar 419,49% dari total target Rp663.535.247.000,00 r.

Akun realisasi pendapatan terbesar per 31 Desember 2022 adalah pendapatan uang sita hasil korupsi yang telah diputuskan atau ditetapkan pengadilan sebesar Rp832.032.447.333,00 r atau sebesar 2.948,74% dari total target Rp28.216.561.000,00.

Bapak-Ibu peserta... serta Anggota Komisi III yang saya hormati,

Meski setiap tahunnya Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh predikat WTP dari BPK, namun sebagaimana pepatah “tiada gading yang tak retak”, pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022 yang kami terima sejak tanggal 25 Juli 2023 masih terdapat beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti.

Selanjutnya izinkan kami untuk memberikan penjelasan terkait tindak lanjut terhadap laporan pemeriksaan atau LHP BPK RI Tahun 2022 sebagai berikut.

Yang pertama, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 terdapat temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B 539, tanggal 3 Agustus 2022, Perihal: Petunjuk dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2021 dan surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B 547, tanggal 8 Agustus 2022, Perihal: Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2021. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut.

A. Pendapatan.

Temuan sistem pengendalian PNBP sewa tanah, gedung, dan bangunan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum memadai. Tindak lanjut yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menerbitkan surat ke KPKNL dengan Nomor B 346, tanggal 9 Juni 2023, Perihal: Permohonan Penetapan Harga Sewa Kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar.

B. Belanja

Temuan penggunaan belanja barang untuk pengadaan atau pembelian aset tetap. Tindak lanjut yang telah dilakukan, pencatatan pada aplikasi Sakti Modul Aset dan disajikan pada laporan keuangan. Selanjutnya, memberikan

surat teguran kepada PPSPM dan PPK terkait dalam melakukan pengujian atas tagihan pengeluaran belanja barang mengacu pada kesesuaian mata anggaran yang telah ditetapkan.

Yang kedua, temuan pertanggung jawaban belanja barang pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI belum sesuai ketentuan sebesar 869,57 juta Rupiah. Tindak lanjut yang telah dilakukan, menerbitkan memorandum Jaksa Agung Muda Pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Kepegawaian, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar kepada Biro Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Bidang Pembinaan dengan surat Nomor B 1151, tanggal, bulan 8, Tahun 2022, Perihal: Pemberian Sanksi atas Temuan Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, melaksanakan *review* dan verifikasi atas bukti-bukti belanja yang belum dipertanggungjawabkan secara lengkap sebesar Rp514.790.221,00 melalui surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor B 91, tanggal 14 November 2022.

Kepada Kajati NTT terkait tindak lanjut LHPLK Kejaksaan RI serta surat Inspektur Keuangan Nomor B 287, tanggal 2 November 2022 kepada Kajati Sumut, Sulsel, Bangka Belitung, dan Sulbar dengan memerintahkan aswas untuk melakukan *review* dan verifikasi bukti belanja.

Kemudian, yang ketiga, temuan kelebihan pembayaran pekerjaan atas realisasi belanja modal pada tujuh satuan kerja sebesar 1,91 miliar. Tindak lanjut yang dilakukan, melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar 1,91 miliar oleh 7 satuan kerja, yakni: Biro Perlengkapan, Badan Diklat, Kejari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Barat, Kejari Jakarta Timur, Kejari Jakarta Utara, dan Kejari Jakarta Pusat.

Aset

Temuan, pengelolaan dan penatausahaan rekening pemerintah lainnya (RPL) belum tertib. Tindak lanjut yang dilakukan, melaksanakan pengembalian ke pihak yang berhak sebesar 4,8 miliar rupiah dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar 13,3 miliar rupiah dan 72.870 US Dollar.

Kemudian, yang kedua, temuan pengelolaan piutang denda dan biaya perkara tilang *verstek* belum memadai. Tindak lanjut yang dilakukan, menerbitkan Nota Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan Surat Nomor B 1174, bulan Agustus 2022, Perihal: Tindak Lanjut Temuan BPK RI Terkait Pengelolaan Piutang Denda dan Biaya Tilang *Verstek*, belum memadai serta telah dilakukan perbaikan penatausahaan berkas tilang melalui nota dinas Nomor 1174 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk segera menindak lanjuti temuan pemeriksaan, menerbitkan surat petunjuk teknis penyusunan laporan dan pengiriman laporan keuangan Kejaksaan RI tahun 2022 kepada seluruh kejaksaan tinggi agar membuat berita acara rekonsiliasi atas data denda dan biaya tilang dari aplikasi e-piutang.

Yang ketiga, temuan pengelolaan dan upaya penyelesaian piutang uang pengganti pada kejar yang belum optimal. Tindak lanjut yang dilakukan, berkoordinasi dengan Mahkamah Agung serta telah dilakukan validasi piutang uang pengganti secara terpadu ke seluruh satuan kerja, serta memerintahkan seluruh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melakukan koordinasi, baik secara langsung maupun melalui sarana formal kepada pihak rutan, lapas atas terpidana yang telah bebas atau selesai menjalani hukuman pokok dan subsider.

Selanjutnya, telah ada peninjauan draf perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Percepatan Penyelesaian Tunggakan Piutang Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui Surat Nomor B149, tanggal 5 Juli 2023. Selanjutnya, Jampidsus menerbitkan surat Nomor B 1346, tanggal 16 Juni 2022, Perihal: Percepatan Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti terhadap Terpidana yang Sudah Bebas atau Selesai Menjalani Pidana, nomor putusan tindak pidana lengkap dan uang pengganti yang tidak ada batas waktu pidana atau subsider, dan telah diterbitkan petunjuk teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam... dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, temuan pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai yang mengakibatkan nilai ekonomi barang rampasan berpotensi semakin turun dan timbulnya resiko penyalahgunaan atas barang rampasan yang belum dilaksanakan eksekusi. Selanjutnya, terdapat dana sejumlah 171 miliar 188 juta 371 ribu 419 ribu rupiah dalam rekening penampungan PT KSEI belum dapat dieksekusi dan penyajian dan pengungkapan persediaan barang rampasan yang berasal dari kasus Jiwasraya masih belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Tindak lanjut yang dilaksanakan: menerbitkan memorandum Jaksa Agung Muda Pembinaan kepada Kepala Pusat Pembelian Aset dengan Surat Nomor B 1149, tanggal 8 Agustus 2022, Perihal: Tindak Lanjut Temuan BPK RI terkait pengelolaan barang rampasan belum memadai, berkoordinasi dengan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan dan KSAP dan telah mendapatkan tanggapan serta telah ditindaklanjuti dan disajikan dengan Laporan Keuangan Kejaksaan RI tahun 2022; telah dibuat *single* investor identifikasi dengan Nomor OTD 1506 AI 539 763 dan membuka rekening dana nasabah dengan nomor 122 001 0429 606 di Bank Mandiri atas nama Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus;

Terhadap adanya dana sejumlah 171 miliar dalam rekening penampungan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah dilakukan pemindahan dari rekening penampungan ke SubRekening Efek Kejaksaan Agung pada tanggal 11 Januari 2022 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp225.167.720.768. selanjutnya terhadap dana uang tunai tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara.

Selanjutnya, temuan penatausahaan dan pelaporan aset tetap belum tertib dan tindak lanjutnya adalah melakukan upaya pencarian aset yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp267.886.463 pada tiga satuan kerja. Terhadap aset tetap yang belum dicatat pada aplikasi Simak BUMN telah dilakukan peng-*input*-an dan disajikan pada Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2022, sehingga tersaji sesuai dengan kondisi senyatanya; diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 26 Tahun 2023, tanggal 12 Mei 2023 dengan pembentukan satuan tugas pengelolaan aset, barang bukti, dan sita eksekusi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di Semester II Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, untuk Semester II Tahun 2022 terdapat temuan BPK RI dalam pelaksanaan intensifikasi PNBPN, sampai Tahun dua ribu... Tahun Anggaran 2022s terdapat Kejaksaan RI dan instansi terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, terutama sebagai berikut.

Satu, temuan penyelesaian eksekusi barang rampasan kasus Jiwasraya berupa waran dan saham belum maksimal, sehingga terdapat waran yang telah jatuh tempo senilai 31,57 miliar dan nilai saham yang semakin menurun, serta terdapat selisih pencatatan jumlah lembar saham. Tindak lanjut yang telah dilakukan: melaksanakan penjualan barang rampasan kasus Jiwasraya berupa waran dan saham sebesar Rp3.069.706.062.666; melaksanakan pencatatan terhadap selisih jumlah lembar saham dan telah disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2022; menerbitkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor Print 16, tanggal 23 Februari 2023 tentang Tim Inventarisasi dan Optimalisasi Barang Rampasan serta Barang Sita Eksekusi terkait Perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

Yang kedua, temuan barang rampasan senilai Rp1,82 miliar yang diperhitungkan sebagai uang pengganti belum dieksekusi dan berpotensi dikembalikan kepada terpidana. Tindak lanjut yang telah dilakukan terkait barang rampasan atas tiga perkara pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Batang, Kejaksaan Negeri Sukoharjo berupa tanah dan bangunan telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan.

Yang ketiga, sebanyak 16.813 unit barang rampasan senilai Rp100,5 miliar yang telah tercatat pada laporan persediaan dan telah berumur lebih dari 6 bulan setelah putusan *inkracht* belum selesai dieksekusi dengan cara dilelang atau dijual. Tindak lanjut yang dilakukan, melaksanakan lelang ke KPKNL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang keempat, upaya eksekusi piutang uang pengganti sebesar 324,57 miliar atas 149 terpidana belum optimal, ditindaklanjuti dengan pencarian harta benda milik terpidana. Tindak lanjut yang telah dilakukan: melakukan sosialisasi dan petunjuk kepada seluruh satuan kerja yang masing... yang masih terdapat tunggakan piutang uang pengganti untuk

melakukan pencarian harta benda terpidana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana atau P48A, apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terpidana, kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait perubahan PMK 145 Tahun 2021 untuk mengatur barang hasil sita eksekusi sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan melalui sama halnya dengan penyelesaian barang rampasan negara; membentuk Tim Kajian Pengelolaan Barang Sita Eksekusi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Bapak-Ibu, Pimpinan, serta Anggota Komisi III yang saya hormati,

Kejaksaan berharap, dengan adanya pembahasan rencana kerja anggaran kementerian RKAKL dan RKP Tahun 2024 dapat menunjang pemenuhan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2024 sehingga pencapaian program kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dapat optimal dan berkesinambungan dengan program prioritas Kejaksaan tahun 2023.

Oleh karena itu, izinkan kami untuk memberikan penjelasan terhadap rencana kerja anggaran Kementerian RKAKL Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagai berikut.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Tahun 2024.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kejaksaan RI telah mengirimkan kebutuhan riil tahun 2024 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas melalui Surat Jaksa Agung Nomor B 11, tanggal 18 Januari 2023, Hal Kebutuhan Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2024. Yang pada pokoknya mengajukan kebutuhan anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.565.499.723.000 . Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor S 287 dan Nomor B 292, tanggal 10 April 2023, Hal yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Indikatif Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.002.179.171.000. r

Kemudian, berdasarkan surat bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Nasional Kepala Bappenas Nomor 644 dan S 626, tanggal 31 Juli, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Anggaran Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.407.179.171.000 atau naik sebesar Rp7.405.000.000.000 r, jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 pada bulan April 2023.

Hasil penyusunan Pagu Anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Agung, 33 kejaksaan tinggi, 437 kejaksaan negeri, dan 63 cabang kejaksaan negeri, serta perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri dan telah dilakukan penelaahan antara Kejaksaan RI, Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada 1 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023, anggaran Kejaksaan RI tahun 2024 per program dan rencana penggunaan anggaran, yaitu sebesar: Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum Bidang Intelijen Pusat dan Daerah sebesar

104.504.539.000; Bidang Tindak Pidana Umum Pusat dan Daerah sebesar Rp323.581.387.000 h; Bidang Tindak Pidana Khusus Pusat dan Daerah sebesar Rp299.781.926.000; Bidang Perdata dan Tata Usaha Pusat dan Daerah sebesar Rp27.741.526.000; Bidang Pidana Militer Pusat dan Daerah sebesar Rp17.544.440.000; Pemeliharaan Barang Bukti sebesar Rp52.838.944.000.

Sementara Program Dukungan Manajemen Bidang Pembinaan Pusat dan Daerah sebesar tujuh triliun lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat dan Daerah sebesar 7 triliun, ulangi, 9.311.010.129.000 r; Bidang Pengawasan Pusat dan Daerah sebesar Rp28.784.647.000; dan Bidang Diklat sebesar Rp182.428.736.000 .

Usulan tambahan anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2024

Jumlah pagu anggaran yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023, Kejaksaan RI pada tahun 2023 mendapatkan alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7.846 formasi, serta alokasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau CPPK sebanyak 249 formasi untuk pegawai tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Adhyaksa.

Mengingat jumlah anggaran belanja pegawai pada pagu anggaran Kejaksaan RI tahun 2024 yang kami terima belum memperhitungkan jumlah penerimaan pegawai formasi CPNS dan CPPPK, serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Perpres Nomor 63 Tahun 2022, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor R 2711, tanggal 19 Desember 2022, Hal: Penyampaian Data Sementara ASN pada 35 KL yang Pindah ke IKN, yang menyatakan 563 orang pegawai Kejaksaan Agung akan dipindahkan ke IKN tahap 1 pada tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari Kejaksaan Agung yang masuk *cluster* 1 skenario dalam asesmen pemindahan kementerian lembaga ke IKN.

Di samping itu, Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di antaranya mendukung mengandung sifat kerahasiaan sehingga membutuhkan gedung kantor tersendiri di IKN maka Kejaksaan RI masih membutuhkan tambahan anggaran pada pagu alokasi anggaran tahun 2024 untuk membutuhkan gaji, uang, makan, dan tunjangan pegawai, serta pembangunan gedung Kejaksaan Agung tahap I di IKN untuk dimasukkan pada program dukungan manajemen sebesar Rp1.736.410.136.000, yang terdiri dari kebutuhan anggaran belanja pegawai CPNS dan CPPK sebesar Rp717.013.376.000, kebutuhan anggaran belanja pegawai CPNS Analisis Penuntut yang beralih menjadi Jaksa sebesar Rp29.092.498.000, kebutuhan anggaran Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan dan Latihan Dasar atau Latsar sebesar Rp190.304.252.000, dan kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung, kantor Kejaksaan pada IKN sebesar Rp2.300.000.000.000 yang direncanakan akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2024 sampai 2026, di mana

anggarannya yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung kantor Kejaksaan RI tahap I pada tahun 2024 sebesar Rp800 miliar.

Kebutuhan anggaran tersebut dalam rangka melaksanakan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum dan mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat yang selanjutnya akan segera disampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan besar harapan kami agar permohonan tersebut dapat dipenuhi serta mendapat dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi penganggaran.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian dalam upaya pengabdian terbaik kepada bangsa negara,

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 31 Agustus 2023,
Jaksa Agung Republik Indonesia,
Burhanuddin.

Terima kasih, Pak Ketua, demikian penjelasan kami, selesai.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Wakil Jaksa Agung atas paparannya yang terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah soal temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti dengan presisi secara organisatoris. Yang ini tolong pembahasannya nanti dalam rapat kerja saja, dalam rapat dengar pendapat tolong didalami catatannya, nanti kita pada saat rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan boleh ditanyakan.

Nah, ini dimasuk kepada anggaran 2024, Kejaksaan Agung membutuhkan tambahan anggaran satu koma tujuh... 1.736.410.136.000. Ini adalah anggaran yang terutama besarnya akibat belum terprediksinya di tahun 2023 bahwa akan ada pembangunan gedung kantor di IKN dan tambahan PNS dan khususnya yang ada di *lap* terakhir penjelasan.

Nah, itu kira-kira nanti kita orientasinya kepada penganggarnya saja ya.

Kemudian yang berikutnya, terima kasih ya, Pak Wakil Jaksa Agung atas penjelasannya.

Berikutnya, kami persilakan Saudara Kepala PPATK untuk memberikan penjelasan.

Terima kasih.

KEPALA PPATK (IVAN YUSTIAVANDANA):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo budaya,

Salam kebajikan bagi kita semua,

**Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Bapak Waja dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung,
Bapak dan Ibu yang hadir dalam rapat kerja ini.**

Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* karena atas rahmat dan *ridho*-Nya kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja pada hari ini sebagai salah satu bentuk dedikasi pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Memenuhi undangan rapat kerja dari Wakil Ketua DPR RI, izinkan kami menyampaikan penjelasan mengenai Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022, Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022, dan Rencana Kerja Anggaran PPATK Tahun 2024.

Terkait penjelasan pertama mengenai Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa BPK telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022 dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Capaian predikat WTP ini adalah untuk yang ke- 17 kalinya berturut-turut sejak tahun 2006. Mohon maaf, sejak tahun 2006.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan Pimpinan dan Anggota Komisi III. Capaian predikat WTP Tahun 2022 juga kami imbangi dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar 213,5 miliar atau 99,03%, serta capaian indeks prestasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia diangka 7,47 dari skala 10, kategori memuaskan.

Selain itu, terdapat pula beberapa capaian prestasi lainnya, baik dalam hal kegiatan kerjasama dan dengan para *stakeholder* terkait maupun dalam hal perolehan penghargaan. Terkait penjelasan kedua mengenai hasil laporan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa temuan yang bersifat administratif dan telah kami tindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan bayar ke kas negara yang dilakukan langsung oleh pelaksana pekerjaan, antara lain:

- a. Pembayaran hasil pekerjaan pemeliharaan pada gedung PPATK Pusat;
- b. Pembayaran personal jasa konsultan pelaksana survei dan penilaian index ekspektifitas peranan PPATK;
- c. Pembayaran pekerjaan pemeliharaan dak asrama pada Pusdiklat APUPPT PPATK.
- d. Pembayaran pengadaan kanopi lapangan tenis pada Pusdiklat APUPPT PPATK.

Sementara untuk satu temuan lainnya, yaitu pembayaran tunjangan khusus pegawai tidak sesuai ketentuan karena kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar, pada hari ini, secara kebetulan, telah dipenuhi, dikembalikan oleh yang bersangkutan sehingga hal tersebut sudah kami laksanakan 100%.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Pagu anggaran PPATK tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp292 miliar yang di dalamnya sudah termasuk Rp75 miliar hasil tambahan anggaran dari dukungan Pimpinan dan Anggota Dewan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PPATK.

Realisasi anggaran pertanggal 30 Agustus 2023 adalah sebesar 218 miliar atau 76%. Anggaran PPATK tahun 2023 juga terdampak kebijakan *automatic adjustment* dan turut diblokir sebesar 23,2 miliar atau 7,93%. Saat ini PPATK sedang berupaya mengajukan dispensasi pembukaan blokir kepada Menteri Keuangan sekaligus permintaan tambahan anggaran bagi belanja pegawai tahun 2023.

Selanjutnya, terkait penjelasan ketiga, pagu anggaran PPATK tahun 2024 telah ditetapkan sebesar 242,3 miliar untuk mendukung program, yaitu:

1. Dukungan manajemen sebesar Rp180 miliar, meliputi belanja operasional sebesar 168,7 miliar dan belanja non-operasional sebesar 11,7 miliar rupiah.
2. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebesar Rp61,9 miliar.

Pagu anggaran ini akan kami gunakan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan PPATK dalam rangka mewujudkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, sebagaimana yang telah dituangkan dalam RenstraPPATK tahun 2020-2024 guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu menjaga stabilitas keamanan nasional melalui penguatan sistem antikorupsi.

Berdasarkan penelaahan terhadap isu-isu strategis dan kegiatan prioritas PPATK, telah ditetapkan tema Renja PPATK Tahun Anggaran 2024 adalah "Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal untuk mendukung program Green Ekonomi, kesuksesan pemilu tahun 2024, dan kiprah Indonesia dalam keanggotaan Financial Action Task Force, yang berfokus pada:

1. peningkatan kualitas teknologi informasi untuk mengantisipasi kemajuan finansial teknologi dalam rangka penguatan data APUPPT PPATK;
2. penguatan sinergi antarlembaga dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu;
3. peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force;
4. percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset;
5. peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan TPPU-TPPT; dan
6. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan *good governance* serta penguatan sarana dan prasarana internal.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,

Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya PPATK telah menyampaikan kebutuhan Pagu Anggaran Tahun 2024 kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas sebesar Rp350 miliar. Namun, hasil realisasi pagu anggaran PPATK ditetapkan hanya sebesar Rp242,3 miliar, dan dapat kami sampaikan bahwa anggaran tersebut belum cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas pencapaian program-program prioritas PPATK secara optimal.

Kami menyadari akan keterbatasan kemampuan APBN secara nasional. Namun demikian, mohon kiranya dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan anggaran PPATK dapat diprioritaskan untuk dipenuhi menjadi sebesar Rp326,7 miliar. Hal ini telah disesuaikan dengan penghitungan kami atas prioritas kebutuhan anggaran untuk tahun 2024.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk mengajukan kembali tambahan anggaran melalui penetapan pagu alokasi sebesar Rp84 miliar kepada Pimpinan, Bapak dan Ibu Komisi III DPR RI, khususnya Anggota Badan Anggaran DPR RI. Adapun kekurangan ini akan digunakan untuk mengoptimalkan program Dukungan Manajemen sebesar Rp36,4 miliar dan program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme sebesar Rp47,9 miliar melalui kegiatan prioritas sebagai berikut.

- Pertama, pengawalan Pemilu, pengawasan pihak pelapor, tidak lanjut *mutual evaluation review financial action task force*, dan dukungan salah...dan dukungan satuan tugas Komite TPPU sebesar 8,9 miliar; kedua, pemenuhan dan pembaharuan sarana dan prasarana sebesar 26,7 miliar; ketiga, peningkatan kinerja operasional sistem TI sebesar

Rp35,1 miliar ;keempat, pengukuran efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, serta pengukuran integritas pihak pelapor sebesar Rp1,9 miliar ; kelima, penguatan Lembaga Diklat APUPPT dan Edukasi Publik sebesar Rp1,8 miliar rupiah;keenam, revitalisasi *human capital* PPATK sebesar 9,7 miliar.

Rincian tambahan anggaran 2024 telah kami sampaikan dalam rapat..., dalam bahan rapat.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati,

PPATK akan senantiasa fokus pada berbagai kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia melalui penerapan pola kerja baru dan untuk itu kami berkomitmen penuh dalam pengelola APBN secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dengan telah dicapainya tujuh belas kali WTP oleh PPATK.

Kinerja PPATK tidak terlepas dari kerjasama dan bimbingan dari Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi III DPR RI sehingga dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada PPATK selama ini.

Demikian kami sampaikan.

Saya kembalikan kepada Pimpinan Komisi III.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Saudara Kepala PPATK yang sudah memberikan penjelasannya atas agenda rapat pada siang hari ini.

Rekan-Rekan sekalian yang kami hormati,

Kita telah sama-sama mendengarkan penjelasan dari mitra kita tentang materi agenda rapat pada sore hari ini. Sekarang waktunya bagi para Anggota untuk mendalami, mencermati, bertanya, menimbang, mengukur. Kami persilakan.

Kita mulai dari sisi kiri dulu, ada?

Ya Pak Wayan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Karena banyaknya kemungkinan pertanyaan, saya fokus pada rekan-rekan di Kejaksaan saja dan ini salah satu bukti dukungan kami karena itu kami dorong beberapa hal.

Yang pertama, Pak, jangan khawatir dan maksimalkan anggaran mengenai *restorative justice* dan Rumah Restoratif Justice. Perkuat ini, maksimalkan ini. Kalau separuh saja perkara yang ada bisa diselesaikan dengan *restorative justice*, Bapak sudah berjasa mengurangi perkara, mengurangi penumpukan tahanan di LP, dan yang paling penting sudah menjawab program nasional karena Pak Jokowi menekankan soal bagaimana mengurangi penumpukan tahanan dan narapidana di penjara.

Pak, Bapak membuat Rumah *Restorative Justice* di kejaksaan negeri, di kejaksaan tinggi bagus, luar biasa, Pak, nambah-nambah saja reputasi Kejaksaan. Tapi, persoalannya, Pak, bagaimana kesinambungannya, Pak, bagaimana kelanjutannya, Pak, bagaimana pengawasannya? Jangan sampai ada kesan, seperti satgas-satgas yang dibentuk, lalu *restorative justice* menghadapi hal yang sama. Banyak satgas yang dibentuk, tapi hanya beberapa yang bisa. Tapi, kali ini Kejaksaan Agung memperoleh reputasi yang sangat baik. Jangan gara-gara reputasi yang luar biasa itu terganggu karena program *restorative justice* ini kurang pengawasan, kurang dukungan, dibentuk, lalu dibiarkan.

Terakhir, berkaitan dengan *restorative justice*, terobosan apa, strategis macam apa tindakan Bapak yang bisa membuat betul-betul perkara menjadi berkurang. Setidaknya, kalau dari data statistik dari tahun ke tahun, begitu ada *restorative justice*, kalau boleh kami targetkan, separuh dari tradisi yang ada itu sudah bisa dikurangi itu. Itu *restorative justice*.

Yang kedua, dukungan anggaran ke depan tentang apa, tentang Jaksa sebagai pengacara negara, Pak. Di daerah-daerah, mohon dijelaskan ini, kerjasamanya antara iya dan tidak dengan beberapa perusahaan daerah, Pak.

Kalau ada kerjasama, bagaimana mengurangi kebocoran keuangan negara, bagaimana meniadakan kebocoran itu, lalu ada kerjasama dengan perusahaan di daerah. Pertanyaan yang paling penting, ini belum kami dapatkan datanya, mungkin kami terlambat mengetahui.

Pak, tolong dijelaskan ini, kalau kerjasama seperti itu sepenuhnya ditanggung APBN atau dimungkinkan menerima dukungan anggaran dari komponen lain, entah itu APBD, entah itu dari BUMN apa... atau dari masyarakat. Mungkin *nggak* ini? Tolong digambarkan agar nanti ke depannya peran-peran yang meningkat ini disertai dengan citra yang lebih mengangkat pada posisi jaksa yang ada selama ini.

Lalu, peran-peran intelijen sesuai dengan Undang-undang Kejaksaan yang berkaitan dengan dukungan anggaran ini, dalam pelaksanaannya,

seperti apa peran intelejen ini untuk memastikan karena undang-undang telah memperkuat posisi intelijen. Seberapa peran intelijen ini untuk memperkuat peran jaksa sebagai pengacara negara? Kami ingin dapat bayangan. Tentu karena undang-undang sudah memberikan peran yang demikian bagus pada intelijen, peran pengacara negara, terutama untuk mengembalikan kerugian negara, keuangan negara harusnya meningkat berbanding lurus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sisi kanan tolong fokus ke anggaran.

Ya, Mas Wihadi, silakan.

F-P GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH., MH.):

Makasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III dan Pak Wakil Jaksa Agung, Ketua PPATK yang kami hormati,

Saya melihat anggaran daripada Kejaksaan, ini ada beberapa hal yang saya justru ingin mempertanyakan kelanjutan daripada program-program itu atau outputnya ya, Pak. Kalau ada program Jaksa Masuk Desa, Jaksa Masuk Sekolah, tapi pada kenyataannya justru banyak kepala desa yang ditangkap jaksa. Jadi, efektivitasnya ini sebenarnya Jaksa Masuk Desa ini dengan anggaran yang disampaikan, ini apakah perlu ada penambahan lagi atau tidak perlu sama sekali, kalau memang ternyata masih ada juga jaksa-jaksa yang masuk dalam pemeriksaan.

Kemudian, dari beberapa daerah, saya melihat anggaran masing-masing kejaksaan ini sangat minim dalam penanganan kasus korupsi. Padahal, kita tahu di sini ada banyak kasus korupsi yang ditangani, *nah*, ini anggarannya dari mana? Harusnya, ini anggarannya, perkara ini membiayai anggaran itu sendiri, membiayai anggarannya dari oleh perkara itu sendiri.

Ada satu hal yang sebenarnya sebagai mitra, saya menjadi tanda tanya karena justru banyak rumah-rumah jabatan kajari itu hibah dari pemerintah kabupaten/kota. Pertanyaannya, independensi daripada jaksa itu dalam memeriksa suatu kasus yang kaitannya dengan pemerintah kabupaten itu apakah masih bisa netral karena saya melihat kantor dan juga bahkan rumah-rumah jabatan sering kali demikian.

Nah, saya melihat di sini, Pak Waja, harusnya hal itu sudah dianggarkan dalam anggaran-anggaran kejaksaan negeri dan ini banyak sekali yang kayak itu. *Nah*, ini salah satu hal yang menjadi perhatian kita semua karena ini kaitannya nanti kalau kepala daerahnya ada i dikit, itu

Jaksanya tutup mata, dibiarkan, pembiaran itu. Bahkan, kalau kita melihat banyak sekali itu, banyak sekali gara-gara itu.

Nah, saya kira hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi karena kita lihat dengan anggaran yang kita berikan penambahan ini, dari 10, kan, menjadi 17. *Nah*, saya melihat karena kita tidak bisa masuk ke satuan tiga, tapi pada saat kita ke dapil, teman-teman ke dapil itu melihat bahwa ternyata anggaran itu sangat minim.

Nah, kalau kita melihat juga mengenai masalah pelayanan yang dilakukan di daerah, ini personal..., personalia di bawah itu, juga kajari itu banyak yang merangkap-rangkap, Pak. Ini rekrutmen daripada Kejaksaan ini saya kira perlu untuk segera juga dilaksanakan karena kita..., ada yang kebetulan di dapil saya itu malah kepala bagiannya merangkap sudah sekian lama, sudah hampir tahunan merangkap, tapi tetap saja masih merangkap.

Artinya, kan, ini personalianya kurang. *Nah*, apakah anggaran kepegawaiannya ini masih kurang? *Nah*, ini saya kira salah satu hal yang perlu dipikirkan karena kalau kita bicara mengenai masalah *output* dan *input* perkara, *input* perkara dari Kepolisian itu tentu banyak sekali. Anggarannya polres, sama anggaran satu polres dengan kejaksaan negeri, itu kalau kita lihat anggarannya jomplang.

Permasalahannya, ini kan jadi masalah yang *bottleneck* kalau di Polisi karena *nggak* akan bisa P21 P21 karena memang anggaran daripada Kejaksaan ini tidak bisa melaksanakan untuk penanganan perkara. *Nah*, berapa penanganan perkara Kejaksaan ini, tentunya harus juga disesuaikan, Pak. Terutama juga kalau misalnya ini adalah anggaran yang namanya korupsi, Pak.

Korupsi ini kan tidak semua provinsi mempunyai Pengadilan Tipikor. Dan, kalau seperti di Jawa Timur itu yang Pak Waja pernah jadi Kajati di sana, itu kalau mau sidang tipikor harus ke Surabaya. Jaraknya berapa dan di Surabaya masih ngantri lagi, biayanya berapa. Jadi, akhirnya kan menjadi jaksa ini dalam menangani masalah korupsi ini juga ogah-ogahan jadinya.

Nah, ini kan sekarang Pak Waja dari Kajati itu *udah* tahu problemnya itu. Saya kira anggaran itu tentunya bisa dianggarkan yang memang seharusnya bisa dilaksanakan oleh jaksa dengan baik dan program-program, eh, *problem-problem* itu kan sudah Pak Waja ini sudah paham mengenai masalah itu. Pada saat itu keluhannya dulu pada saat kita dulu kunker Jawa Timur juga sebenarnya seperti itu.

Nah, ini kesempatannya, Pak Waja, itu bisa bagaimana Kejaksaan ini bisa diperbaiki dalam permasalahan-permasalahan anggaran ini.

Nah, kalau misalnya hal-hal yang kaitan dengan belanja modal, saya kira itu sambil berjalan, Pak, ya. Jadi, mungkin saya kira beberapa hal yang saya garis bawah ini adalah menjadi perhatian kita semua.

Saya kira begitu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ok, Mas.

Sisi kiri, Mbak Rizka, setelah itu siap-siap Pak Dim.

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan serta rekan Komisi III,
Yang saya hormati Bapak Wakil Jaksa Agung beserta seluruh
jajarannya,
Yang saya hormati Bapak Kepala PPATK beserta seluruh jajarannya,**

Pertama-tama saya ingin mengapresiasi PNBK Kejaksaan Agung, terutama pada poin pada nomor 6, Pak Waja, pendapatan penjual barang rampasan hasil sitaan yang telah dilakukan oleh pengadilan sudah mencapai 444% atau sebesar 233 miliar. Begitu juga pada pendapatan uang sitaan hasil korupsi sudah mencapai hampir 3.000% atau sekitar 832 miliar. Ini merupakan hasil dari kerja cepat, kerja tepat, dan kerja tanggap dari Kejaksaan Agung. Mohon dipertahankan, Pak, kerja baiknya ini.

Selanjutnya, saya ingin fokus pada penambahan Pagu Indikatif Kejaksaan Tahun Anggaran 2024 sebesar 7 triliun, di mana totalnya akan mencapai sebesar 17 triliun. Melihat dari postur tambahan anggaran tersebut, saya ingin bertanya, di dapil saya, di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Pak, mempunyai rusunawa baru untuk para jaksa-jaksa yang sedang berdinasi di wilayah Sumatera Selatan.

Adapun aspirasi dari mereka rusunawa tersebut belum maksimal digunakan karena belum ada anggaran operasionalnya, Pak, baik itu listrik, air, ataupun operasionalnya. Pertanyaannya, Pak, pada postur anggaran ini apakah sudah dicantumkan terkait anggaran untuk operasional sarana dan prasarana tersebut di rusunawa Sumatera Selatan? Jika sudah ada, pada poin mana hal tersebut dimasukkan. Jika belum, saya izin mengusulkan, atas izin Pimpinan, untuk dimasukkan anggaran operasional tersebut, Pak.

Ini krusial, karena kita sudah mempunyai prasarana yang bagus tapi sekarang masih belum maksimal digunakan. Mohon ini menjadi pertimbangan prioritas, Pak. Ini juga akan mengacu kepada kinerja Kejaksaan Agung yang semakin tanggap dan profesional.

Untuk PPATK, saya pun mengapresiasi realisasi anggaran PPATK Tahun Anggaran 2023 sampai dengan saat ini, 30 Agustus 2023, sudah mencapai 76%. Lalu, di sini saya juga melihat di dalam hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022, pada poin 1 mengenai pengenaan pembayaran tunjangan khusus pegawai tidak sesuai dengan ketentuan yang mencapai sebesar 174 miliar. sebagai tindaklanjutnya saat ini sedang dalam proses penagihan kepada bersangkutan, yang saya baca.

Di sini pun saya akan bertanya, kenapa bisa sampai terjadi ketidaksesuaian pembayaran, Pak? Ini sudah jelas ada kesalahan dalam kinerja di dalam bidang pembayarannya dan ini harus segera ditindaklanjuti sesegera mungkin karena sekarang ini sudah mencapai akhir 2023 dan mau masuk dalam tahun 2024. Ini lumayan cukup lama, Pak, agar segera bisa diselesaikan.

Mungkin demikian, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mbak Rizka.

Kami persilakan berikutnya Pak Dimiyati.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ketua dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Waja, Kepala PPATK yang saya banggakan.

Saya bicara RKA aja, Pak, karena Pak Ketua sudah menekankan di RKA 2024. Ini apresiasi dulu untuk Kejaksaan Agung yang nambah 7T. Kita semua, KL, dapat tambahan dari pagu indikatif ke pagu anggaran. Tapi, kita lihat usulannya, eh, pertama, Kejaksaan ini *alhamdulillah* sudah bisa dua *digit*, Pak. Sebelumnya *nggak* pernah, Pak,

Sebelum Pak Burhanuddin ini belum pernah dua *digit*, Pak. Jadi, *alhamdulillah* ini dua *digit* dan kerja keras ya, kerja tuntas yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung harus lebih baik lagi, Pak. *Output, outcome, benefit*-nya, *impact*-nya, kerjasamanya harus kita lakukan.

Saya hanya minta rencana kerja RKA 2024 yang berdasarkan pagu anggaran yang sudah disetujui bersama sebesar 17 triliun. Itu *breakdown*-nya mohon kami minta, Pak, *breakdown*, dan juga yang Bapak inginkan di pagu alokasi, ini tinggi sekali, Pak, lebih dari dua kali lipat *tuh*. Tapi, saya senang ini kalau lihat punya... apa... ambisi atau optimis yang begitu besar Kejaksaan Agung mengharapkan anggarannya mencapai 43 triliun. Berarti, Bapak punya rencana yang luar biasa.

Kami minta *breakdown*-nya, Pak, untuk apa itu rencana kerja agar 43 triliun itu sehingga kami bisa sisir satu persatu, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang ada wujudnya, atau kadang-kadang *nih*, anggaran bukan hanya di Bapak dan Ibu sekalian, tapi di KL ini, ada juga yang saya tuntutan, Pak, baunya... apa... kecium, barangnya *kagak* ada. Coba, mungkin *udah* ditangkap juga dengan Kejaksaan Agung.

Nah, kami berharap di Kejaksaan Agung ini sekarang Kejaksaan menjadikan apa, kita lihat kinerjanya baik, Pak, apalagi kepercayaan publik sekarang meningkat kepada Kejaksaan Agung. *Nah*, ini harus dipertahankan. Memang, untuk mempertahankan sebuah predikat baik itu sangat sulit sekali.

Ini beberapa hal yang di Kejaksaan Agung yang kami lihat, yang Bapak sampaikan, rincian-rincian per program itu belum mencakup semuanya, kalau kita lihat Bapak sampaikan. Rincian kegiatan prioritas saja, tahun anggaran 2024 itu *totally*-nya hanya 130 miliar sekian. Padahal, itu prioritas, sedangkan belum mencapai titik triliun, *gitu*.

Kami berharap Bapak menjabarkan itu dan kami minta, Pak, sebelum pengetokan palu, kemungkinan pagu alokasi itu September, Pak, di pertengahan September itu sudah..., sudah diputuskan. *Nah*, Kami ingin berjuang pada tataran itu, asal jelas rencana kerja dan anggaran program untuk 2024. *Gitu*, Pak Waja, Pak Jampbin. Titip itu, Pak, anggaran rumah dinas Kajari Pandeglang itu jelek, Pak, rumahnya itu. Kasihan dia, walaupun nanti Kajarinya baru, Pak.

Pak Jambin ya, titip, Pak.

Cukup, Pak.

KETUA RAPAT:

Orang itu istrinya, Bupatinya istrinya dia, Pak.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya, kalau tidak kita anggarkan dari pemda, kalau Kejaksaan Agung tidak mampu, *gitu*.

Lanjut, PPATK. PPATK juga di sini mengusulkan adalah sebesar 350 miliar 400 juta Rupiah, itu harapan pagu indikatif, ya. Yang mana pagu

indikatif terlebih dahulu, baru pagu alokasi ya, tapi disetujui hanya Rp242.325.421.000.

Kira-kira *nih*, Pak, PPATK itu bisa *nggak* dengan uang 242 itu bisa bekerja secara maksimal? Kalau ditambahin, kira-kira apa? Kalau Kejaksaan Agung kan jelas bahwa rencananya adalah banyak kegiatan. Mungkin di sektor pidana umum lebih ditambah, khusus ditambah sehingga target-target di Kejaksaan Agung itu tidak kecil, *gitu* ya, tidak hanya satu dua kasus yang ditangani. Saya tahulah, di daerah itu kecil-kecil sekali dan menunggu perhatian kita. Tapi, kalau PPATK bagaimana? Kalau dengan 242 bisa bekerja, kenapa mesti minta nambah?

Nah, apa rencana PPATK untuk rencana kerja dan anggaran mencapai 350 miliar tersebut, berarti penambahannya kurang lebih 100 miliar lebih. Ini di antaranya untuk apa? Apa membeli alat sadap atau membeli apa, begitu, prioritasnya?

Nah, mohon kami juga minta apa... rincian tersebut, dan rincian pagu anggaran ini minta di-*breakdown* secara detail, begitu, sehingga kami bisa mempelajari itu semua.

Jadi, itu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih.

Pak Supriansa.

F-PG (SUPRIANSA, SH., MH.):

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,
Kepala Kejaksaan Agung, dalam hal ini Pak Waja bersama ... (suara tidak jelas) dan jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini,
Kepala PPATK dan jajaran yang sempat hadir,**

Assalamu ' alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Karena pembahasan pada hari ini, Pak Ketua, Pak Jaksa Agung, bersama dengan PPATK maka saya fokus soal anggaran saja. Terkait dengan rencana RDP nanti dengan bahan-bahannya, nanti pada saatnya kami akan sampaikan.

Pertama, jadi ada, saya hanya bagi tiga poin. Pertama, berbicara tentang pagu indikatif yang ada maka saya melihat, dari yang diusulkan

PPATK pada tahun 2024, 242 miliar. Saya mau jujur menyampaikan, ini angka yang kecil, tetapi menopang kerja yang keras, yang besar oleh PPATK.

Mengusulkan usulan tambahan anggaran 2024 ini hanya 84 miliar. Betul ya, Pak Ivan, ya? Kalau saya melihat ini angka yang diusulkan Pak Ivan, saya mewakili dari Fraksi Partai Golkar menyatakan tidak ada keraguan, dan tentu kita memberikan *support* tentang itu, berarti selesai soal itu.

Kemudian, dari Kejaksaan Agung, pagu indikatif 2024, 10 triliun lebih ya, Pak Jambin, ya. Usulan tambahan 2024, 2024 ini adalah 11,4 triliun. Kemudian, ada poin-poinnya tadi yang saya catat, tambahan terkait dengan penambahan permintaan anggaran ini, usulan anggaran ini, saya sudah baca di halaman 62 dan lengkap sekali perencanaan-perencanaannya.

Kalau lengkap seperti ini, saya mau sampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar juga terkait dengan pengusulan anggaran ini, tidak ada keraguan dari fraksi kami untuk memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan.

Kenapa? Karena Kejaksaan Agung selama ini memberikan kinerja yang sangat baik sekali. Selain daripada penegakan hukum yang ada, juga cenderung kita melihat upaya penyelamatan keuangan negara begitu besar, sangat besar sekali, bahkan kita bisa mencapai, bahkan bisa mencapai ratusan triliun. Hanya satu titik saja, seperti Jiwasraya, jika ini terjual seperti apa yang disampaikan tadi, bisa mencapai 3 triliun, itu baru satu titik.

Betapa mulianya Bapak-Bapak dengan jajaran Kejaksaan Agung semuanya sampai ke bawah bekerja dengan baik dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Kalau begitu, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada keraguan kami untuk memberikan dukungan untuk penambahan anggaran ini, Pak. Jadi, selesai soal itu.

Yang kedua, terkait dengan temuan BPK di masing-masing lembaga. Kejaksaan Agung sudah memberikan tadi bahwa sehebat-hebatnya kita, ternyata juga ada nilai yang dibuat oleh orang di luar kita, sesuai dengan tupoksinya dan ada beberapa catatan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kalau begitu, singkat saja kalau menurut saya, apakah ada kendala dari pihak Kejaksaan dalam rangka menjawab semua rekomendasi yang diberikan? Apakah sudah dilaksanakan semua atau ada yang sulit untuk dilaksanakan? Kalau ada yang sulit dilaksanakan, Pak Waja, ya, maka kita bisa selesaikan secara bersama-sama, kalau memang ada kendala. Tapi, saya rasa yang berat-berat saja Kejaksaan bisa selesaikan, apalagi yang tidak terlalu berat.

Kemudian, PPATK juga, apalagi mendapatkan opini WTP, kalau tidak salah dengar tadi, Wajar Tanpa Pengecualian sudah diraihinya pada tahun sejak 2006 sampai sekarang. Kalau sudah seperti ini modelnya, Pak Ivan dan jajaran, maka tentu tidak ada yang bisa kita ragukan terkait dengan itu. Tetapi, apa pun juga namanya, selalu ada catatan-catatan yang menjadi rekomendasi oleh pihak BPK.

Olehnya itu, pertanyaannya sama dengan Pak... ke Jaksa Agung tadi bahwa adakah kendala yang kita hadapi dalam rangka membuatkan, menjawab semua rekomendasi BPK yang diberikan kepada PPATK? Kalau ada kendala, kita selesaikan. Kalau tidak ada kendala, diselesaikan secepatnya karena ini adalah takaran dan ukuran bagaimana kita merespon apa yang menjadi temuan BPK.

Terakhir, saya simpulkan dua-duanya bahwa, baik dari Kejaksaan Agung maupun dari PPATK sama-sama mengajukan tambahan anggaran. Kalau begitu, saya menyampaikan yang ketiga kalinya bahwa tidak ada keraguan dan kami akan memberikan dukungan terkait dengan penambahan anggaran yang telah diusulkan oleh Kejaksaan dengan PPATK. Selesai pembicaraan saya di sini. Terkait yang lainnya nanti itu akan kita bicarakan pada saat rapat-rapat RDP.

Saya kira begitu, Ketua, saya kembalikan.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Pak Johan Budi. Kemudian, siap-siap Heru, mungkin yang terakhir.

Oh, masih banyak sekali. Katanya, ikan cepat..., ikan sepat, ikan gabus”.

Oke, kita kasih jatah-jatahdua, sini dua.

Pak Johan Budi.
Berikutnya, sini, Heru ya.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Terima kasih, Ketua Komisi III.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi dan juga Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Pak Waja dan juga para Bapak JAM, kemudian
Kepala PPATK dan juga jajaran yang saya hormati.**

Sebenarnya, kalau soal anggaran, Pak, saya yakin semua fraksi, semua Anggota Komisi III pasti tidak ada yang menolak, berapa pun yang Bapak-Bapak ajukan. Apalagi, ini perlu kita sampaikan secara terus terang ya, Kejaksaan Agung sudah menunjukkan kinerja yang luar biasa, termasuk PPATK ya. PPATK sekarang juga sangat mewarnai dalam kaitan dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Karena itu, saya yakin anggaran berapa

pun yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dan juga PPATK pasti kami akan menyetujuinya di Komisi III.

Ke PPATK dulu. Pak Ivan. *Nah*, ini, 2024 ini, anggaran yang disampaikan adalah 242 miliar.

Kemarin saya sampaikan juga ke KPK, Pak Ivan, saya tidak tahu apakah di PPATK ini juga perlu adanya pembaharuan *nih* terhadap alat-alat atau infrastruktur yang ada di PPATK karena saya belum pernah mendengar di 242 ini atau pengajuan anggaran sebelumnya, PPATK juga mengajukan untuk *upgrade* peralatan dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas di PPATK.

Apakah di 242 itu juga termasuk *upgrade* peralatan yang dimiliki oleh PPATK dalam rangka mengendus terjadinya tindak pidana pencucian uang ya, terutama transaksi-transaksi yang mencurigakan. Karena ke depan ini, Pak Ivan, saya kira teknologi informasi semakin canggih dan pelaku-pelaku TPPU juga semakin canggih menyamakan hasil TPPU-nya karena itu harus didukung juga dengan peralatan yang canggih juga, begitu.

Kepada Kejaksaan Agung, Pak Waja, beberapa kali saya ke daerah dan mengunjungi kejaksaan negeri, kemudian juga ada kejaksaan tinggi, saya mengecek apa yang dulu pernah menjadi cita-cita Pak Fadil ya, mengenai *restorative justice* itu, Pak.

Itu kan ada ininya, Pak, ada rumah ya, yang dibutuhkan oleh kejar, terutama kejaksaan negeri untuk melaksanakan RJ itu, Pak. Karena ini menurut saya penting dalam rangka tidak..., tidak hanya mengurangi proses panja yang di dalam kaitan dengan tindak pidana-tindak pidana ringan ya, tapi ini juga membantu publik ya.

Jangan sampai yang dulu Pak Fadil pernah sampaikan, untuk Rumina yang hanya mengambil satu buah coklat, *gitu*, itu diadili, Pak, dibawa ke pengadilan. Ini kan menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat.

Nah, Pak Waja, saya ingin menanyakan anggaran yang diajukan tadi, untuk 2024, terutama apakah juga masuk terhadap itu, Pak, pembangunan rumah-rumah yang untuk RJ itu, Pak, di kejar-kejar ya, karena ini menurut saya penting sekali dalam rangka yang tadi saya sampaikan.

Yang kedua, Pak, saya ingin menanyakan *nih*, Pak, beberapa pos anggaran ya, yang menurut saya perlu dijelaskan ya. Apakah di sini, apakah nanti dalam bentuk tertulis ya, dan ini jumlahnya cukup besar ini, Pak. Misalnya, pengadaan alat kontra intelijen untuk VVIP di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini apakah memang ada kondisi bahaya betul, *gitu* ya, buat VVIP yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atau Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nilainya sampai 100 miliar masing-masing. Jadi, 200 miliar. Ini apakah dalam bentuk..., dalam bentuk apa itu, Pak, dan apa..., apakah ini menjadi skala prioritas dari Kejaksaan Agung.

Yang kedua, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kejaksaan yang ada di IKN, Pak. Di sini disebut ada mobil listrik dan apa..., dan lain-lain untuk mendukung kerja Kejaksaan Agung di Ibu Kota Nusantara tahun 2024.

Apakah Kejaksaan Agung yakin ya, 2024 kita akan pindah, Pak, *gitu*, ke sana. Ini pertanyaan mendasar *aja*, Pak. Kalau yakin, ya, *nggak* apa-apa. Jangan sampai nanti begitu dianggarkan, ternyata tidak terwujud, Pak, di 2024. Ini maksudnya pengadaan ya, Pak. Kalau IKN, ya, kita berdoa semoga terwujud IKN-nya. Tapi, pendukung, daya pendukungnya itu apakah bisa dilaksanakan apa ataukah tidak karena jumlahnya cukup besar ini, mobil listrik dan lain sebagainya.

Nah, ini mohon dijelaskan, Pak. Kalau di 2024 Agustus ya, rencananya, berarti kan harus ada pengadaan, paling tidak di awal-awal tahun 2024, *gitu*. Kalau ternyata tidak jadi, i, Pak, anggaran yang sudah di pos, yang jumlahnya cukup besar.

Terakhir, menyambung dan ini disampaikan oleh..., ini pertanyaan ini *aja*, Pak, apa ya, ini PPATK, Kejaksaan Agung kemarin itu juga ada lembaga-lembaga lain hampir setiap tahun dapat WTP, sementara temuan BPK saya lihat berjibun, banyak sekali, baik Kejaksaan Agung maupun PPATK.

Dalam logika sederhana saya, kalau namanya Wajar Tanpa Pengecualian harusnya tidak ada temuan-temuan, *gitu*. *Nah*, ini sampai di Kejaksaan Agung ini juga ada temuan dari BPK berkaitan dengan beberapa hal ya, termasuk juga PPATK. Untungnya ini dijelaskan bahwa ini sudah bisa diselesaikan. Tapi, ini pertanyaan sebenarnya ke BPK ya, bukan Kejaksaan Agung dan PPATK karena yang mendapatkan Kejaksaan Agung dan PPATK, *gitu*.

Nanti ya, mungkin kita nitip ke tempat yang ada BPK-nyalah nanti, mitranya, itu kita tanyakan, *gitu*, karena temuan-temuan yang dipaparkan di sini, itu juga ada kaitannya dengan bagaimana Kejaksaan Agung dan juga PPATK *good governance*, *good governance* ya, dalam kaitan dengan pengelolaan anggaran yang disediakan, baik di Kejaksaan Agung maupun di PPATK *gitu*.

Ya, sekali lagi, kerja-kerja yang sudah ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung dan PPATK saya lihat sekarang semakin luar biasa ya, dan ini perlu didukung oleh..., jangan malu-malu untuk mengajukan anggaran yang besar kepada Komisi III karena saya yakin semua fraksi, sekali lagi mendukung apa yang diajukan oleh, baik Kejaksaan Agung maupun PPATK karena kita sudah melihat kinerjanya.

Saya kira itu, Pak Ketua Komisi III, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Johan Budi, tapi perlu saya ingatkan bahwa WTP, status WTP itu yang menerbitkan BPK bukan mitra itu.

Berikutnya, Mas Heru, silakan.

F-PKB (HERU WIDODO, S. Psi.):

Terima kasih, Pimpinan.

Heru Widodo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Kalimantan Selatan 2, Nomor Anggota A-55.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta seluruh rekan-rekan Komisi III yang hadir,
Yang saya hormati Pak Wakil Jaksa Agung serta seluruh jajaran, ada Pak Jambin dan Pak Jampidsus,
Yang saya hormati Pak Kepala PPATK, Pak Ivan, dan seluruh jajaran,**

Saya fokus pada rapat hari ini, yaitu tentang anggaran. Yang pertama adalah Kejaksaan Agung. Ini dalam pagu indikatif sebesar 10 triliun sekian, lalu kemudian ada usulan tambahan sekitar 11 triliun, dan kemudian disetujui sekitar 7,4 triliun, dan kemudian masuk dalam nota keuangan sekitar menjadi 17,4, 17 triliun koma 4.

Artinya, tentu ini juga didukung dengan program-program yang saya kira ini dapat direalisasikan. Satu contoh, misalnya soal dukungan manajemen di IKN, pembangunan kantor baru, dan lain sebagainya. Kemudian, ada..., apa namanya..., kebutuhan SDM di sana yang saya kira juga perlu dipenuhi, dan saya kira juga menjadi angka yang realistis, meskipun tidak semuanya bisa dipenuhi, Pak Waja. Tapi, saya kira ini bisa nanti menjadi penopang untuk kinerja-kinerja oleh Jaksa Agung ke depan menjadi lebih baik lagi.

Kemudian, PPATK. Ini dia, pagu indikatif ini pengajuannya 242,3 miliar. Kemudian minta tambahan 84,3 miliar, tapi kemudian tidak atau belum disetujui dalam nota keuangan, masih tetap sama, yaitu sekitar 242,325 miliar.

Saya bertanya, jangan-jangan ini tidak setuju karena kemarin ungkapan 300 triliun itu, jangan-jangan, transaksi mencurigakan itu, jangan-jangan ya, tapi saya pikir kita harus *husnudzan* kepada Kementerian Keuangan bahwa itu tidak ada kaitannya. Tapi, saya kira bahwa sebetulnya PPATK ini juga perlu mendapatkan dukungan anggaran karena memang ke depan ini tantangan PPATK menjadi semakin berat, apalagi transaksi keuangan lewat elektronik ini juga semakin canggih dan semakin maju, misalnya judi online, lalu kemudian ada transaksi narkoba, transaksi tindak

pidana pencucian uang, kemudian pembiayaan terorisme dan lain sebagainya.

Saya kira, ini perlu dipertimbangkan oleh rekan-rekan fraksi yang ada di Komisi III bahwa kebutuhan untuk PPATK sebesar usulan tambahan 84 sekian miliar ini saya kira ini juga menjadi angka yang realistis. Benar tadi kata Pak Johan Budi, kalau kemudian PPATK tidak melakukan... apa namanya... pemutakhiran sarana prasarana, saya kira akan kalah canggih dengan para penjahat yang menggunakan teknologi yang lebih baik dan lebih maju dari PPATK.

Saya kira dari Fraksi PKB akan mendukung sepenuhnya dari usulan anggaran dari Jaksa Agung maupun PPATK untuk usulan tambahan, sekaligus dan kami akan mendorong untuk dilanjutkan pada tingkat selanjutnya.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Oke. Pak Gilang, silakan.

F-PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, SH., LL.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Pak Ketua Komisi III beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi III,
Yang saya hormati juga kepada Bapak Wakil Jaksa Agung, serta
Bapak Ketua PPATK, Kepala PPATK yang telah hadir di sini serta
seluruh jajarannya,**

Terima kasih, Pak, atas pemaparannya yang sangat jelas dari Kejaksaan Agung dan juga dari PPATK. Kebetulan tadi saya juga *udah dengerin* semuanya, Pak, ada beberapa yang disampaikan di sini terkait dengan..., jadi, beberapa minggu lalu saya sempat lihat di Instagram Kejaksaan Agung. Saya baca, pemulihan keuangan negara sangat tinggi, ada sekitar berapa puluh triliun. Tapi, saya lihat di sini, Pak, ini kenapa anggaran buat Jamdatun sangat rendah? Saya rasa ini ke depannya perlu kita tingkatkan lebih lagi, Pak, karena kita lihat dengan penggunaan keuangan negara yang sangat besar tentu harus ada..., harus masa berbanding kebalik dengan anggaran yang ada.

Terus, juga yang saya tanyakan di sini terkait tadi juga, saya sempat baca *monitoring* terhadap barang bukti. Apakah sekarang sistem yang ada

sudah efektif dan apakah dengan anggaran yang ada sekarang sudah bisa menunjang dengan terbangunnya sistem *monitoring* yang lebih baik? Tadi saya baca ada sekitar 1.000 lebih barang bukti yang belum terlelang. Artinya, ini kan ada masalah di sini. Sistemnya kenapa, apa yang salah atau apa. Jadi, tolong di sini dijelaskan seperti apa.

Dan juga dari ke PPATK, halaman 30, saya... halaman 31, saya baca di sini, C. tindak lanjut MER FATF (*Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF)*) dalam pelaksanaan kerjasama sebesar 700 juta. Saya rasa ini bukannya program yang sudah rutin, Pak, tiap tahun? Kenapa dimasukkan di program tambahan, seperti itu.

Itu saja dari saya, Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya.

KETUA RAPAT:

Ok, makasih.

Mas Dede.
Siap-siap Mas Awi.

F-PDIP (DEDE INDRA PERMANA, S.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Waja beserta jajaran JAM dan jajaran Kejaksaan, Kepala PPATK dan beserta jajaran,

Saya ingin fokus saja kepada RKA, khususnya kepada Kejaksaan. Apakah penyerapan 2023 sudah bagus atau tinggi? karena Kejaksaan penyerapannya masih rendah, Pak, dan tentunya kita butuh penyerapan bagus karena kegiatan di Kejaksaan yang sekarang ini semakin baik.

Tadi yang disampaikan teman-teman tentang IKN, tentunya membutuhkan gedung di sana untuk yang sifatnya rahasia untuk Kejaksaan. Termasuk kita juga kemarin waktu kunjungan ke Jawa Timur, program yang bagus untuk Rumah Sakit Adhyaksa itu bagus bagi pembantaran terdakwa atau rehabilitasi narkoba.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Mas Awi.

Siap-siap Mas Doktor Hinchu.

F-P GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.):

Pak Rahmat, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, saya dengar bisik-bisik sebelah saya itu, "Siapa namanya orang baru ini?" "Awi," katanya. Jadi, aku dibohongi sebelah saya ini.

F-P GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.):

Terima kasih, Ketua.

Yang pertama, kepada Pak Waja serta Pak Jaksa Agung Muda, saya hanya menyampaikan aspirasi, Pak Wakil Jaksa Agung, ya, dalam aspirasi mohon diinventarisir, guna ditingkatkan ya, kompetensi, integritas, keterampilan ya, para jaksa-jaksa yang ada di daerah. Ini kaitannya dengan kelancaran pembangunan di daerah dan kemajuan di daerah.

Kita tahu bahwa semakin tahun APBN kita ini semakin besar dan di 2024, kalau tidak salah sekitar 800 triliun itu kita transfer ke daerah. *Nah*, di sini saya melihat, Pak, ada pos anggaran untuk pembinaan, pengawasan pusat daerah, triliunan *nih*, Pak. Juga ada pos anggaran masalah pengawasan, juga diklat.

Nah, maksud saya, Pak, mohon pos-pos anggaran ini digunakan, dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan tadi itu, integritas, keterampilan, serta kompetensi para jaksa-jaksa yang di daerah. Tadi yang disampaikan oleh senior saya, Pak Wihadi, tadi itu bahwa masih kita temukan jaksa-jaksa yang tidak profesional di daerah. Ini banyak, Pak, termasuk di daerah pemilihan saya di Jawa Timur 1, Surabaya, Sidoarjo. Ini yang pertama, Pak, untuk... apa namanya... Kejaksaan.

Kemudian untuk PPATK, tadi belum sempat saya temukan bahwa dari hasil pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, maupun PPSPM ini, uang yang diselamatkan atau uang yang bisa diberikan kontribusinya kepada negara itu berapa dari PPATK ini? Ini juga penting, Pak, karena kan PPATK itu informasi awal tentang... apa namanya... akan terjadinya kerugian negara.

Ini kan nanti akan..., akan..., akan..., ditindaklanjuti oleh KPK dan kita nanti bisa *cross check* informasi awal dari KPK ini. Berapa potensinya, kemudian ketika nanti... apa namanya... di tindakan, ditindaklanjuti oleh ... (suara tidak jelas 1:47:08) ini apa seperti itu eh PPATK.

Kemudian, tadi disampaikan juga apa namanya..., ada permohonan tambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan dari 242 M ke 326 M. Artinya, ada 84 M ini, Pak. *Nah*, syukur-syukur kalau tambahan anggarannya tadi itu, seperti yang diucapkan Pak Johan Budi, itu juga untuk mengantisipasi, Pak, ya, mengantisipasi kemajuan teknologi yang dipakai dalam rangka pencucian uang itu, Pak. Jadi, Bapak bisa mengantisipasi di sana.

Sementara ini dari saya, Ketua, terima kasih.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Oke, makasih.

Ini gimana kalau ke luar masuk. *Nggak* tahu hukum Kau!

Silahkan Panjaitan!

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS / KAPOKSI):

Terima kasih, Pimpinan.

**Ketua Komisi III yang saya hormati dan para Anggota yang saya hormati,
Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, dan seluruh Pimpinan
Kejaksaan yang hadir, juga
PPATK, Pak Ivan, dan kawan-kawan semua,**

Pimpinan,

Terima kasih tadi di awal kita diingatkan bahwa pembahasan ini adalah *laps* atau putaran terakhir kesempatan para mitra untuk memperbaiki anggarannya. Ini adalah kesempatan yang terakhir sebelum nanti diketok yang kita sebut tadi berapa pagu indikatifnya, berapa yang mau ditambahkan. Saya ingin itu kita garis bawahi.

Saya mulai dari Kejaksaan. Bagi saya, Kejaksaan adalah pemilik tunggal perkara yang kita sebut *dominus litis* itu ya maka anggaran kita, kita fokuskan ke situ. Pasti muaranya ke perkara, baik mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai nanti persidangan dan eksekusi. Dan, itulah yang kemudian, hari ini, saya ingin mendengarkan anggaran kali ini agak berbeda, Pimpinan karena kita telah memberi kesepakatan kita, Undang-undang Kejaksaan baru, spirit baru, semangat baru untuk anggaran ini, dan ini putaran terakhir, dan karena itu kita coba untuk menganalisisnya dan memberi catatannya.

Catatan kami dari Fraksi Partai Demokrat, tidak ada keraguan sedikit pun untuk tidak menyetujuinya, tapi saya ingin mengkritisnya. Misalnya, kita mulai langsung anggaran itu mau untuk apa dan bidang apa. Misalnya, tentulah program penegakan dan pelayanan hukum yang tadi terjemahan dari *dominus litis* ini.

Saya mulai dengan bidang intelijen. Ini bagus sekali, di halaman 48 sampai dan seterusnya 49 saja, itu anggarannya 104 miliar sekian atau 104,5 miliar, lengkap sekali programnya.

Saya hanya ingin, ada yang lupa ini satu, dan saya harus sampaikan ini karena ini penting, yakni pasca kelangkaan minyak goreng di kita yang sempat menghebohkan, bahkan Kejaksaan Agung pun memeriksa perkaranya. Apa itu, karena itu berkaitan dengan produk pertanian kelapa

sawit kita, penghasil CPO terbesar di dunia, tapi kita kelangkaan minyak goreng.

Karena itu, saya mohon ditambahkan, kalau ini ada program Jaksa Masuk Desa, Jaksa Menyapa, saya mau mengusulkan namanya James Bon, Jaksa Masuk Kebon, Jaksa Masuk Kebon Karena di sinilah sumber malapetaka itu. Satu, STS, sawit tukar sabu, di situ narkobanya, di situ pencuriannya. Kecil-kecil, yang tadi Johan Budi tadi menyampaikan. Kecil-kecil dia, tetapi besar sekali dampaknya pada sistem perekonomian nasional.

Karena itu, intelijen kita harusnya ini betul-betul tegas di sinidan jumlah pemakai narkoba terbesar bukan lagi di kota, tapi di tempat-tempat sunyi nun jauh di afdeling-afdeling perkebunan, tempatnya Bang Trimed ini, dapilnya, kebun-kebun itu semua. Jadi, saya ingin itu ditambahkan agar anggaran ini bisa masuk ke sisi itu.

Yang kedua, di bidang tindak pidana umum, ini Pak Fadil, 323 miliar setengah ya. Ini saya kira cukup bagus. Tapi, kalau kita lihat ke perkaranya yang akan diselesaikan, dasarnya adalah menghasilkan atau digunakan menangani 140.000 perkara di daerah serta 2.514 perkara dan keadilan restoratif 534 satker di daerah.

Pertanyaan saya, angka ini kita tentukan sudah menuntaskan tahun akan datang ini *nggak*, Pak, atau baru berapa persen dari target itu, *gitu*. Apakah ada 200.000, ada dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga angka 100, eh, 323 miliar tadi masih bisa masuk di situ.

Saya ingin menambahkan saja, ini mohon pendapatnya dan, Pimpinan, saya kira kita diskusikan. Ada pelayanan pos perkara ini yang menjadi hambatan teman-teman kejaksaan. Misalnya, di daerah kalau sidang itu sampai malam itu sehingga si terdakwa harus dikembalikan ke rutan. Rutannya *udah* tutup, rutannya sudah tutup, taruh ke mana ini, *gitu*.

Pertanyaan saya adalah, ini sama *nggak* pikiran kita, saya usul, Pimpinan, rutan itu ditarik saja ke kejaksaan sebab masih wilayah *dominus litisnya*. Tapi, kalau sudah lapas, sudah terpidana. Itu urusannya si Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki kualitas pelayanan itu.

Mungkin gara-gara dulu kita pakai penjara, lalu kemudian menjadi lapas sehingga rutan pun ketarik, *gitu*.

Pertanyaan saya, Pak Fadil, ya, Pak Waja, ya, dan Pimpinan, apa *enggak* kita masukkan itu. Tarik rutan itu supaya memang pekerjaan kita menjadi maksimal. Saya menyaksikan sendiri, betapa jaksa, karena sudah malam sidangnya, harus dibawa ini ke rumah. Terpaksa dikasih makan dan seterusnya. Bukankah kita, yang saya sebut Anda pemegang tunggal memonopoli tentang perkara, termasuk menahan si tersangka atau terdakwa tadi?

Jadi, rutannya, itu pikiran saya, Pak Waja, kalau *nggak* bisa sekarang, saya minta tahun depan itu dibuat sedemikian rupa, supaya betul-betul sukses ini pelayanan hukum ini. Itu untuk yang pidana umum. Apakah sudah masuk? Saya lihat belum ada karena kita menumpang kepada rutan.

Istilahnya, kita taruh di kamarnya, kuncinya mereka yang pegang. *Nggak* pas ini menurut saya, itu. *Nah*, memang pembahasan juga waktu itu rame. Tapi, ini menurut saya yang tentang tahanan ini penting ini, Pak.

Khusus mengenai tindak pidana khusus, yang 299,7 miliar, ini lengkap sekali, dan saya kira tidak ada masalah ya. Nanti kita dorong ini. Tinggal saya... pertanyaan saya sama dengan Pak Fadil itu tentang targetnya 1.581 perkara penyelidikan ini, Bang Febri, 1.109 perkara penyidikan, 1.217 perkara di tingkat penuntutan, dan penuntutan di 534 satker di daerah.

Itu, angka itu kita pakai apakah *based* perencanaan kita karena memang berdasarkan pengalaman kemarin, jumlah perkara dan seterusnya, selesai atau tidak ini, kira-kira begitu *tuh*.

Bidang perdata tata usaha negara, kalau ini saya dari dulu kita udah sepakat, Komisi III ini dan anggarannya yang cukup kecil 27,7 miliar. Tapi, ada catatan saya ini, ini kaitannya dengan *conflict of interest*.

Kalau kita memberi legal opini kepada pemerintah daerah, itu *fair*, tapi kalau menjadi *lawyer*-nya si Bupati atas gugatan perdata warganya, menurut saya *ndak* pas, itu menurut saya *ndak* pas. Misal, ketika selesai, Pak Waja, selesai itu *project*, lalu selesai, kemudian ditagihkan, merasa *nggak* bener itu, "Kalau Kau *nggak* setuju, Kau gugat itu."

Nah, ini yang jadi *lawyer*-nya kan teman-teman di Jamdatun, kan, Datun, padahal temuannya nanti itu dipidana di Pidsusnya. *Nah*, saya ingin, Pak Waja, harus kita bereskan ini ya, Pak Jamdatun, ya, supaya tidak terjadi *conflict of interest* itu, jangan rakyatlah lawanmu. Kalau menurut saya, *gitu*, gitulah, karena yang harus kita bela belum tentu juga itu pemdanya benar.

Nah, ini yang untuk Kejaksaan, mumpung putaran terakhir ini, Pak Waja, seperti yang disampaikan Ketua tadi, apakah sudah masuk ini semua? Kalau belum sempat masuk, Ketua, kenapa kita tadi diskusi, kita kan, tinggal ketok saja ini, naik ke Banggarmaka tahun depan catatan-catatan kita ini harus menjadi *start* perencanaan di Kejaksaan Agung.

Terakhir, PPATK.

Pak Ivan, saya membaca dengan lengkap tadi, juga bagus, kaitannya BPK-nya juga *nggak* ada temuan yang berarti. Saya hanya juga bertanya, apakah peralatan-peralatan kita yang serang..., sekarang ada masih *valid* atau masih bisa mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang luar biasa cepatnya, terutama judi online dan kalau itu belum, kapan mau dimasukkan anggarannya itu untuk memperbaiki atau meng-*upgrade*-nya.

Yang kedua, saya ingin tanya ini. Kan, kita sukses itu, laporannya sekian, yang menerima ini APH ini, baik KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian, sudah Kau kasih lengkap, termasuk kemarin yang menghebohkan itu, TPPU kita yang sampai 300 sekian triliun, tersisa masih 189 triliun, yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung mengenai emas impor. Oke.

Pertanyaan saya begini, Pak Ivan, dari semua produkmu tadi yang Kau hasilkan dengan anggaran yang sekian itu, Kau serahkan *deliver* kepada aparat penegak hukum. Berapa yang sudah mereka tindak lanjuti, 1%, 10%, 50%, atau 100%supaya kita tahu apakah anggaran yang kita beri kepada PPATK itu ada manfaatnya, *gitu*.

Nah, nanti ini mungkin, Pimpinan, untuk rapat kerja, tapi bagi saya ini penting anggaran ini, udah kita kasih. "Bang Hinca, kami sudah lapor sekian perkara. Urusan di sana jalan atau tidak."

Oh, sebentar. Kan sia-sia anggaran kita. *Nah*, ini mohon dijelaskan. Kalau tidak sempat di sini, nanti ke depan perencanaannya seperti itu sehingga kita tahu, puas berapa persen Anda serahkan kepada aparat penegak hukum? Katakanlah di sebelahmu Kejaksaan Agung, Kau beri misalnya 100 laporan, berapa yang menjadi barang itu, 1, 2, 10, 100, atau berapa, *gitu*.

Begitu juga ke KPK, begitu juga ke Kepolisian. Kita *nggak* boleh bilang, "Terserah dia, Bang. Kami yang penting sudah kasih." Tidak, karena kita mau tanya anggaranmu bisa kau pakai untuk itu atau tidak.

Nah, dengan begitu maka terakhir, ini menggoda kita ini di halaman 2 yang ..., (suara tidak jelas 1:59:22). programnya nomor 4, Percepatan Pengesahan RUU Perampasan Aset. Berapa anggaranmu untuk itu? karena kita sedang menunggu juga, mana RUU-nya itu.

Nah, kalau mempercepat, Anda yang mempercepat atau Komisi III yang mempercepat dan bagaimana bentuknya atau hanya memasukkan di sini, berapa anggarannya untuk mempercepat rancangan Undang-undang Perampasan Aset karena ini memang menjadi perhatian kita sangat serius semua.

Dari semua penjelasan saya, Ketua, Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui anggaran yang diajukan ini, baik oleh Kejaksaan Agung maupun oleh PPATK dengan catatan-catatan kami yang menjadi PR untuk perencanaan anggaran tahun depan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Pandjaitan.

Saya ingatkan bahwa ini sudah jam empat. Jadi, saya perpanjang dulu 15 menit untuk memberi kesempatan Bimantoro dan Sekjen PKS.

(KETOK PALU 1 KALI)

Silakan, Pak Bimantoro.

F-P GERINDRA (BIMANTORO WIYONO, S.H.):

Makasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati,
Pak Waja dan Kepala PPATK beserta jajaran yang berkenan hadir pada
siang hari ini,**

Tidak terasa kita sudah kurang lebih dua jam mendengarkan semua masukan dari teman-teman mengenai anggaran yang sudah diperlakukan dan sudah dijalankan oleh Kejaksaan Agung beserta dengan PPATK. Saya di sini yang pertama, ingin mengapresiasi tentang realisasi anggaran di Kejaksaan Agung dan PPATK yang sudah mencapai lebih dari 98% dan dua-duanya mitra Komisi III ini sudah mendapatkan WTP yang sudah berulang kali sampai dengan hari ini dan bisa terus dipertahankan sampai dengan hari ini.

Saya pun melihat capaian yang kinerja juga, dari mulai Kejaksaan sampai dengan hari ini sudah banyak sekali pengungkapan kasus dan lain sebagainya sampai dengan yang masyarakat berpikir tidak mungkin akan dibongkar, tapi dibongkar juga sampai dengan hari ini. Dan, saya ucapkan terima kasih atas kerja-kerja kerasnya, kerja tuntasnya dari teman-teman Kejaksaan sehingga kami dari Fraksi Partai Gerindra tentu saja akan pasti akan mendukung dalam usulan tambahan maupun dalam anggaran yang dicanangkan.

Oleh karena itu, sama pun dengan PPATK, kami pun banyak melihat juga kinerja-kinerja juga yang sudah diberlakukan oleh PPATK sampai dengan hari ini, dari mulai pengungkapan dan membantu aparat penegak hukum untuk memberikan data-data valid yang sudah disetorkan sampai dengan hari ini.

Mungkin saya ingin mendalami di Kejaksaan Agung sedikit saja ya, Pak Waja, yaitu mengenai diklat ataupun bimbingan teknis tentang Program *Restorative Justice*. Di sini ada dua, ada Diklat *Restorative Justice* dan Bimbingan Teknis Penguatan Program *Restorative Justice* Narkotika. *Nah*, saya ingin bertanya, apakah memang berbeda dari... isi daripada diklat tersebut sehingga ini harus dipisahkan dalam pagu anggarannya.

Selanjutnya, kami pun ingin bertanya mengenai pengadaan alat *assessment* secara daring untuk seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Seingat saya, di pagu anggaran yang lalu ini sudah pernah

dimasukkan. *Nah*, ini perbedaannya apa, Pak, sama yang terdahulu, apakah memang ada penambahan ataupun pengadaan baru?

Mungkin itu saja, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih.

Terakhir, kami persilahkan Pak Habib.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Oke, makasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Bambang, yang saya cintai dan saya hormati dan yang saya banggakan, Yang telah hadir mitra kami, mulai dari Pak Waja, Jampidum, Japidsus, jam apalagi tuh..., Jambin sama Intel, Unsur PPATK dengan jajarannya,

Sepakat berbatikria nampaknya, kayak hari Jumat nampaknya. Tapi, menarik saya jaketnya. Jaket yang dipakai ini, PPATK ya, pasti ada anggarannya ya, iya.

Dulu kalau saya Ketua MKD, ini udah saya tegur sebenarnya mitra kita pakai batik begini *nih*. Tapi, saya sudah *enggak* Ketua MKD. Saya serahkan ke Pak Habib mestinya atau maaf, ada Pak Adang. Jadi, rapat ini diusahakan harus pakai baju PSL, Pak, atau baju dinas ya. *Ndak* tahulah sekarang.

*Hinggap di dahan si burung Pelatuk
Dahan kuat pohon Mahoni
Bahas anggaran nggak boleh ngantuk
Siapkan kopi untuk menemani*

Ya.

Pak Jaksa Agung yang diwakili oleh tim yang begitu lengkap, saya bangga, saya sampai sekarang ini selalu membanggakan Kejaksaan yang bisa mengembalikan aset ya, sampai 39,5 triliun. *Nggak tau tuh* PPATK, catet *nggak, gitu* ya, masukkan itu. Kalah *tuh* Polri, *kejaksa...*, apa... eh, KPK....

Nggak, bukan *ngadu*. Perlu kita juga hargai yang sukses-sukses ya. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi untuk Kejaksaan Agung yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI sebanyak tujuh kali berturut-turut ya, ini adalah prestasi yang baik, harus kita tingkatkan ya.

Nah, membaca rencana kerja yang disampaikan Kejaksaan, ada hal menarik, yaitu penyelesaian 2.514 dengan keadilan, restoratif. Ini *udah*

meningkat *nih*, Pak, sesuai undang-undang yang baru ya. Perkara ini tersebar pada 534 satker di daerah.

Saya kira pendekatan restoratif itu bagus karena mengurangi beban peradilan dan juga mengurangi beban lapas, ya. Namun, ada pertanyaan menjadi catatan saya, Pak Waja.

Dalam rencana kerja yang disampaikan ada *item* Bimbingan Teknis Penguatan Program Restorative Justice Narkotika. Yang kemudian pertanyaan, apakah memang benar kejahatan narkotika ini menjadi ini bisa direstoratif untuk narkotika? Bentuknya kayak apa modelnya, restoratifnya didialogkan, dilobby, diajak *ngobrol*, atau kalau narkotika *tuh* musti ditembak atau ditahan?

Ini *nih*, mesti logika ini harus di..., dipahami. Kalau narkotika bisa restoratif, wah, ngeri-ngeris sedap *nih*, yah, ngeri-ngeris sedap. Bentuknya kayak apa kira-kira? Jangan sampai program ini menjadi tameng para mafia narkoba. Mafia-mafia narkoba denger *nih*, Pak, ya. Saya minta hal ini menjadi atensi yang mendalam, Pak Waja.

Dan, kalau berbicara anggaran, sudahlah, Pak, di akhir masa-masa pemerintahan ini saya akan berikan anggaran sebanyak-banyaknya, berapa pun Bapak minta. Maunya minta jangan dikit-dikit, Pak. Saya sebagai Sekjen PKS dan Anggota Komisi III dari PKS mendukung angka yang Bapak ajukan semua.

Tepuk tangan dong, *woi*, waduh. Pak Bambang *nggak* ngerti kita bantu ini, padahal oposisi *loh*, Pak. Tugas saya menghabiskan uang negara untuk kerja negara. Oke, PPATK, tinggal catat mencatat *sampeyan* ya.

Pertama, saya apresiasi juga atas capaian PPATK dalam pengelolaan keuangan. Kalau dari... kalau dilihat ya, dari bahan yang disampaikan Bapak dan tim, serapan anggaran tahun 2022 sampai 99,02%. Selain itu, ada delapan penghargaan yang diperoleh oleh PPATK, mulai opini WTP dari BPK, sampai penghargaan dari KIP. Betul, Pak, ya?

Ini adalah capaian bagus, saya sampaikan apresiasi dan harus diperhatikan dan sangat diperhatikan oleh kita. Cocok, *gitu* ya. Anda yang mencek keuangan dan Anda laporan paling rapih ya. Jangan sampai begitu Anda yang menjaga sesuatu, tetapi anda sendiri yang bermasalah.

Saya rasa ajuan pagu anggaran yang disampaikan PPATK ini layak untuk diberikan persetujuan, Pak Ketua. Jadi, saya ajak semua fraksi di Komisi III ini, terlepas setuju atau tidak setuju, kita dukung saja anggaran semua ini ya. Tentunya, kita harus terus mendorong PPATK terus dapat merealisasikan prinsip penganggaran berbasis kinerja ya.

Sebagai catatan, saya minta PPATK terus bekerja sama dengan para penegak hukum untuk memberantas judi *online* yang sangat meresahkan masyarakat. Ngeri-ngeris sedap, Pak, judi *online*, Pak. Kalau belanja masih mending, *online*. Kalau judi, ngeri, Pak. Kalau *udah* habis, bingung belanjanya

di mana lagi *tuh* duit ya. *Nggak* kelihatan lagi *tuh* uangnya, tahu-tahu harus dibayar ya, asik aja dia main.

Nah, bukan pernah. Saya tahu persis banyak pemain-pemain itu. Kalau judi ngertilah saya, ngerti, gampang. Itu barang tua *kok* itu. Judi, zina *tuh* barang tua semuanya *tuh*, ya, barang bersejarah. Kalau nggak jelas, tanya Supriansa, sahabat saya paling mengerti peristiwa kehidupan manusia sejak Adam dan Hawa.

Sebagai catatan, jadi tadi itu jika tak salah PPATK sendiri mencatat, perputaran uang di rekening para pelaku judi *online* mencapai Rp81 triliun Bener *nggak nih*, Pak? Jawab aja, benar atau tidak, Pak, oke.

Saya senang, Pak. Bapak jawab begitu *tuh*, ada *tajawub* istilahnya, ada menjawab, *gitu*. *Nggak* bengong saja ya. Bangga saya, Pak.

Pada periode Januari-November 2022 *loh*, Pak, itu. Angkanya naik signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 57 triliun. Tentu PPATK perlu mem-*follow up* data ini dengan para penegak hukum dan lainnya, Pak, yang ada. Jangan sampai kita ini kalah dengan jaringan judi *online*. Prinsipnya... prinsipnya kita bantulah kehidupan masyarakat bisa lebih baik lagi.

Pak Ketua,

Ini mungkin dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya sampaikan pantun pula.

Gadis manis memakai kebaya.
Masuk ke kampung cari alamat.
Judi *online* menjadi bahaya.
Ancaman untuk semua masyarakat.

Pak Ketua,

Saya, terima kasih, mohon izin saya *enggak* lanjutkan. Saya mau langsung ke DPP. Mau rapat, Pak Ketua. Mau *ngurus* masalah calon presiden ya.

Terima kasih.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Oleh karena Pak Sekjen PKS mau menetapkan calon presiden barunya dan segera meninggalkan ruang rapat, oleh karena itu, rapat akan segera kita akhiri. *Nah*, apa itu kurang terhormat nanti.

Izin, tadi ini semua udah dicatat karena jawabannya, *monggo*, nanti dikirim *aja* lewat tertulis. Sekarang kita masuk ke draf kesimpulan *aja* ya karena semua *udah sepakat kok*.

Ya, kita lihat draf kesimpulannya. Jadi, Pak Sekjen harap ikut mendengarkan kesimpulannya.

F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Yes, Alhabsy.

Nomor satu, kesimpulannya *nggak* banyak.

1. Komisi III DPR dapat menerima penjelasan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 serta tindak lanjut semua temuan BPK Tahun 2022 untuk kemudian digunakan sebagai bahan-bahan dalam rapat selanjutnya.

Cocok ya?

(RAPAT SETUJU

Yang kedua, ini yang penting.

2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia atas Pagu Anggaran 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp17.407.179.171.000 dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar 1.736.410.136.000 sehingga totalnya ditambah, sehingga totalnya menjadi sebesar Rp19.143.589.307.000 .

Cocok?

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS / KAPOKSI):

Tambah “totalnya” Ketua, belum diketik, tambah “sehingga totalnya”.

KETUA RAPAT:

Ya “sehingga totalnya”, sehingga total, udah, oke.

(RAPAT SETUJU

Nomor tiga,

3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa keuangan, Transaksi Keuangan atas Pagu Anggaran 2024 yang menetapkan..., yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 242.325.421.000 yang akan memperjuangkan usulan tambahan bersama program, beserta programnya sebesar Rp84.383.423.000 sehingga totalnya menjadi sebesar Rp326.708.844.000.

Cocok?

(RAPAT SETUJU)

Dengan demikian rapat kita akhiri, namun sebelum diakhiri....

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Pimpinan, sebentar, Pimpinan,

Sebelum ditutup, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Opo?

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Saya interupsi.

KETUA RAPAT:

Diizinkan interupsi yang terkait dengan materi.

F-PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Iya, ini terkait dengan materi saya. Jadi, gini, kita tadi sudah berjam-jam, maksudnya bukan Jaksa Agung Muda, kita berbasa-busa bicara menganalisis apa yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung dan juga PPATK, tapi kesimpulannya sudah bisa ditebak. Ya, seperti itulah dengan kementerian atau lembaga apa pun. Tapi, saya mohon, Ketua Rapat, agar apa yang tadi kita bicarakan, yang kita tanyakan dijawab oleh Kejaksaan Agung dan PPATK sehingga kita bisa punya pegangan, usulan, dan saran itu nanti bisa diperhatikan oleh Kejaksaan Agung dan PPATK.

Secara menyeluruh kita setuju, tapi tadi ada beberapa yang disampaikan oleh teman-teman di Komisi III agar itu dijawab ya, termasuk anggaran yang tadi saya tanyakan, mohon dijawab secara tertulis sehingga kita bisa membacanya, Pak Waja, yang kemudian nanti suatu ketika kita bisa mengkonfirmasi lagi apakah anggaran yang diajukan itu sesuai dengan apa yang dibelanjakan oleh Kejaksaan Agung maupun oleh PPATK.

Demikian, Ketua, saran dan usul saya, mohon untuk dipertimbangkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih. Tolong nanti dibaca Tatib tentang interupsi, Pak, *gitu* ya. Kalau itu, tadi sudah kita *putusin* bahwa nanti akan dijawab secara tertulis ya.

Oke, saya kira tidak hormat kalau kita tidak memberikan kesempatan bagi para Waja dan Pak Kepala PPAK untuk memberikan *closing statement*.

Kami persilakan.

WAKIL JAKSA AGUNG RI (DR. SUNARTA):

Terima kasih atas semua masukan bahwa masukan yang kami terima, semua terima dari Ketua dan seluruh Anggota ini adalah untuk kemajuan dan kami perbaikan-perbaikan di institusi kami. *Insyah Allah* akan kami laksanakan dan mudah-mudahan ini semua akan membawa perbaikan dan kebaikan untuk Kejaksaan ke depan. Dan, semua apa yang kami terima adalah menunjukkan bahwa Komisi III merupakan mitra dan sangat mencintai Kejaksaan, tentunya dan tentu ini semua adalah untuk NKRI yang lebih baik lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Waja. Janji sudah diberikan sebagai mitra kental juga sudah disampaikan.

Silakan, Pak Kepala PPAK.

KEPALA PPAK (IVAN YUSTIAVANDANA):

Terima kasih, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III.

Sekali lagi kami tidak ragu untuk menjalankan seluruh arahan dan..., apa..., masukan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi III dan *Insyah Allah* dengan dukungan dari Komisi III dan keseriusan kami, kami berkomitmen untuk menjalankan semua amanah yang diberikan kepada kami. Sekali lagi, terima kasih, *Insyah Allah*, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III selalu sehat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Dengan demikian rapat kita akhiri. Terima kasih kedatangan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung dan seluruh jajaran PPATK, *thank you very much, matur nuwun, ban ban kamsia*. Kita akhiri rapat kita sore hari ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.19 WIB)
(RAPAT SELESAI)**

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP.196711041988032001